

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Gerakan Aksi Kamisan telah berlangsung selama 17 tahun lebih hingga saat ini belum mendapatkan respons nyata dari pemerintah baik secara implementatif maupun regulatif. Belum ada kemajuan dari pemerintah dalam upaya penyelesaian kasus-kasus tersebut melalui regulasi yang memberikan kejelasan atas tuntutan massa Gerakan Aksi Kamisan. *Contentious politics* menjadi salah satu fenomena Gerakan Aksi Kamisan yang ditandai oleh perseteruan yang melampaui batas-batas politik formal. Dalam memahami pola dan mekanisme dari *contentious politics* dapat menggunakan skema yang mengidentifikasi dan menganalisis *political opportunity structure, resource mobilization, dan framing process*. Proses penelusuran ini dilakukan, karena *contentious politics* memerlukan pemenuhan konteks dari tiga konsep dasar. Ketiga fakta ini menjadi syarat fundamental bagi terjadinya *contentious politics*, meskipun tidak selalu terjadi secara bersamaan.

Dalam konteks *political opportunity structure* masih masifnya perbedaan pandangan antara lembaga pengadilan mengakibatkan kesulitan dalam pelimpahan berkas untuk diselidiki. Kedua, lembaga pengadilan tidak mampu atau tidak mau menindaklanjuti kasus pelanggaran HAM berat yang melibatkan aktor politik penguasa masa lalu yang masih berada di pemerintahan saat ini menyebabkan proses pengadilan terhambat. Ketiga, terdapat kurangnya keharmonisan antara masyarakat sipil dan pemerintah. Beberapa pejabat pemerintah menganggap Aksi Kamisan yang dilakukan oleh masyarakat sipil sebagai gangguan semata yang

tidak perlu didengarkan atau dipertimbangkan. Ketidakjelasan dalam penanganan kasus HAM ini merusak nilai-nilai *Good Governance*, karena tidak terciptanya ruang-ruang terbuka bagi masyarakat sipil dalam proses demokrasi dan tidak terjaminnya pemenuhan hak-hak warga negara. *Framing process* Aksi Kamisan dapat diartikan sebagai sebuah aksi simbolik yang secara konsisten dan berkelanjutan memperjuangkan penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM di masa lalu. Selain itu, Gerakan Aksi Kamisan juga melambungkan semangat melawan impunitas terhadap kasus pelanggaran HAM yang dilakukan oleh pemerintah. *Resource mobilization* melalui pengumpulan massa dalam Gerakan Aksi Kamisan telah berjalan dengan baik. Gerakan ini telah berkembang dan menyebar ke berbagai daerah di Indonesia seiring dengan meningkatnya kesadaran politik tentang pentingnya penegakan hak asasi manusia (HAM) di negara ini. Dalam memaksimalkan upayanya menjalankan mobilisasi sumber daya partisipan terutama di kalangan anak muda, *public figure*, dan akademisi dengan memaksimalkan media sosial Gerakan Aksi Kamisan telah menciptakan wadah baru untuk diskusi “Ngaso Malam Kamis” yang berbeda dari yang diselenggarakan. Hanya ada sedikit catatan perlu adanya peningkatan jumlah kehadiran massa aksi yang masih dinilai kurang masif jumlahnya untuk bisa menekan negara agar bisa segera serius dalam menangani penyelesaian masalah HAM berat masa lampau. Sehingga, perlu adanya mobilitas yang signifikan dari massa Aksi Kamisan untuk memecahkan kesulitan dalam mencapai titik terang dalam struktur mobilisasi politik antara kedua belah pihak untuk menemukan solusi atau langkah konkret untuk menyelesaikan kasus-kasus pelanggaran HAM tersebut. Faktanya, belum terbentuknya pengadilan HAM ad hoc menjadi indikasi kurangnya *political will* dari Presiden sebagai kepala negara. Situasi ini menunjukkan bahwa meskipun ada berbagai macam upaya mobilisasi yang kuat dari masyarakat sipil, tetapi disisi lain pastinya Gerakan Aksi Kamisan perlu untuk menyelesaikan tantangan dan hambatan politik dalam menghadapi pemerintah masih menjadi hal yang nyata dalam mencapai tujuan dari pada gerakan ini.

5.2 Saran

5.2.1 Saran Praktis

Dari hasil penelitian ini, diajukan beberapa rekomendasi saran sebagai berikut:

1. Disarankan kepada Gerakan Aksi Kamisan untuk dapat mempertahankan eksistensinya dengan tetap aktif di media sosial, mengadakan diskusi, dan melakukan kunjungan ke universitas serta sekolah, sehingga aksi ini semakin dikenal oleh berbagai lapisan masyarakat.
2. Disarankan kepada Gerakan Aksi Kamisan untuk dapat menemukan solusi dalam menghadapi hambatan terbesar dalam penyelesaian kasus-kasusnya, yaitu adanya kekuatan politik dari masa lalu yang terlibat dalam pelanggaran HAM dan masih memiliki posisi di pemerintahan saat ini. Hal ini secara signifikan mempengaruhi jalannya proses persidangan yang mengakibatkan penyelesaian kasus-kasus tersebut terhambat hingga saat ini.

5.2.2 Saran Teoritis

1. Disarankan kepada peneliti selanjutnya untuk mengkaji lebih dalam terkait dengan dukungan sumber daya dalam bentuk finansial yang diberikan pihak eksternal seperti halnya partai politik, masyarakat, dan organisasi internasional terhadap keberlanjutan Gerakan Aksi Kamisan.